

Pengaruh Penerapan Otonomi Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan)

Yonadap Ajamsaru

Ari. J. Rorong

Verry Y. Londa

Abstract: This research moved from the initial observation that the application by the amah Village Autonomy Law. No. 6 Year 2015 About the Village is not optimal so that the impact on the low participation of rural communities, especially in the district of South Sorong Regency Saifi. Thus, this study aimed to analyze the effect of implementation of village autonomy to public participation in the development of Saifi village in the district of South Sorong regency. Denagn applying the method of descriptive and quantitative approaches and applying inmtrumen questionnaire, distributed to 46 people selamnjutnya government officials Kampung distributed into five villages. After the data and information collected, then processed and analyzed by using frequency tables and analysis product moment correlation analysis and simple linear regression to test the hypothesis.

The results of data analysis menunjukkan that (1). The implementation of village autonomy is in the category "medium" tend to be "low", while the level of community participation in rural development are in the category of "moderate" tend to be "high". (2). The implementation of village autonomy as one of the factors that influence people's participation in rural development. The implementation of village autonomy contribute positively and significantly on the level of participation of rural communities, especially in the district of South Sorong Regency Saifi. Thus, it can be concluded that the hypothesis can be tested by empirical validity as well as to justify the underlying theories.

It is necessary to give some suggestions, among others: (1). Not optimal application of Village Autonomy, it is expected that the government (district / city and province) is committed to delegate authority under the legislation in force regarding some matters that are directly handled by the village government so as to encourage an increase in the intensity of the implementation of village autonomy. (2). It is recommended that the local government encourages well as streamline the functions of village institutions as a partner with the village government through education and functional training.

Keywords: *Autonomy village, community participation, rural development*

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan pedesaan mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan (Adisasmita, 2006:3).

Pembangunan masyarakat desa mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat. Melalui cara tersebut peningkatan dan pengembangan desa menuju desa swasembada dapat terwujud. Pembangunan

desa mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4).

Peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan dapat diartikan sebagai aktualisasi dari kesediaan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih rinci lagi pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "Development Community" di mana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "Independent Community" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secaramandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan disemua aspek kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini, Adisasmita (2006:34) menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal (desa). Partisipasi dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek pembangunan di masyarakat yang direncanakan oleh masyarakat sendiri.

Namun, sesuai dengan hasil pengamatan awal di lokasi penelitian, khususnya di kampung-kampung dalam wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, diketahui bahwa peranserta atau partisipasi masyarakat dalam proses penyenggaraan pembangunan belumlah optimal. Hal ini diindikasikan dengan masih banyaknya anggota masyarakat yang kurang peduli terhadap kegiatan yang sifatnya gotong-royong sebagai akibat dari masuknya proyek-proyek pemerintah dipedesaan yang lebih menggunakan pendekatan *top down* ketimbang *bottom up*, terutama dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga masyarakat mulai terbiasa menerima upah kerja. Budaya local atau kearifan lokal yang dulunya lebih mengedepankan sifat gotong-royong masyarakat kampung, secara perlahan-lahan mulai tergerus oleh dinamika program/proyek pemerintah. Kondisi ini, diduga ada kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip otonomi desa yang belum optimal dilakukan.

Dalam konteks inilah, penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul : Pengaruh penerapan Otonomi Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Suatu Studi di Distrik Saifi kabupaten Sorong selatan). Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Seberapa besar pengaruh penerapan otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan”?

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan “untuk menganalisis besarnya pengaruh penerapan otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan”.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat ganda. Di satu sisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial,

khususnya bidang kajian administrasi publik dan pemerintahan daerah. Di sisi yang lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak terkait, khususnya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa di era otonomi desa di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

Dalam pelaksanaan otonomi desa salah satu agenda pokok yang hendak dilaksanakan adalah suatu reformasi birokrasi. Saat ini setiap desa memiliki hak untuk mengembangkan kemandirian dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik dibidang politik, ekonomi, maupun budaya, maka memerlukan suatu birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan dalam menghadapi ketidakpastian di masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Sumaryadi (2005 : 87) Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah (termasuk otonomi desa) yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Dengan penerapan otonomi desa yang mengedepankan desentralisasi dan demokrasi, sangat besar harapan digantungkan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan akuntabilitasnya dengan mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka kepada masyarakat. Dalam salah satu prinsip pelaksanaan otonomi desa yaitu dilaksanakannya otonomi secara luas, nyata dan bertanggungjawab, tidak terkecuali dalam hal pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan

pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya.

Oleh sebab itu, pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya dan tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.

Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa salah satu esensi dari penerapan otonomi desa diarahkan sebagai wahana untuk mewujudkan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari esensi tersebut maka timbulah suatu kewajiban untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dimana di dalamnya dicanangkan salah satu tujuan khusus yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan proses pengambilan keputusan, implementasi, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Dalam perspektif ini, menurut Huntington dan Nelson (1994 :270), partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan desa, kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam kaitan ini, Tjokroamidjojo (1996:113), menyebutkan, pertama : partisipasi aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan; kedua, keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Dengan demikian, penerapan otonomi desa secara benar dan konsisten akan mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan di berbagai aspek.

Mengacu pada uraian kerangka teoritis pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : “Penerapan Otonomi desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Distrik Saifi Kabupaten Sorong

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat, maka pendekatan kuantitatif relevan digunakan dengan penerapan metode deskriptif (Nazir 1999; Koentjaraningrat, 1997); dan ekplanatoris survai (Vredenburg, 1981). Hal ini dimungkinkan karena di samping penelitian ini ingin mengungkap masalah-masalah yang bersifat aktual dan faktual, juga bertujuan untuk mencari hubungan/pengaruh antara satu faktor atau gejala dengan faktor atau gejala lainnya. Menurut Vredenburg (1981), bahwa metode ekplanatoris survai adalah metode yang digunakan untuk menguji suatu hipotesis, atau lebih umum lagi menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel-variabel.

Mengacu pada hipotesis penelitian, maka penelitian ini melibatkan dua variabel pokok, masing-masing : (1). Penerapan Otonomi Desa sebagai variabel bebas atau *independent variable* yang diberi simbol X; dan (2). Partisipasi Masyarakat sebagai variabel terikat (tergantung) atau *dependent variable*, yang diberi simbol Y. pembangunan yang berlangsung dalam masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat prakarsa, inisiatif dan keikutsertaan masyarakat, baik

Adapun definisi konseptual dari variabel-variabel penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penerapan Otonomi desa sebagai variabel bebas atau variabel X, dikonsepsikan sebagai penerapan prinsip-prinsip otonomi desa atau otonomi murni berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai budaya atau kearifan lokal yang berlaku dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, mulai dari perencanaan sampai pada pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa, seperti : prinsip demokrasi dalam perencanaan (*bottom up planning*), prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi (Widjaja, 2003).

Partisipasi Masyarakat sebagai variabel terikat, dikonsepsikan sebagai keterlibatan rakyat di dalam proses pengambilan keputusan, dalam implementasi program, dalam menerima manfaat pembangunan, dan dalam menilai atau mengevaluasi setiap program (Taliziduhu, 1987). Jadi, menurut konsep ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan atau keterlibatan individu sebagai anggota masyarakat dalam fase-fase

2. Mental/pikiran, tenaga/fisik, maupun material (termasuk uang) dalam proses pembangunan kampung, khususnya di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

Secara operasional, variabel-variabel tersebut di atas dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Penerapan Otonomi desa sebagai variabel bebas (X), diamati melalui indikator-indikator, sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana pembangunan kampung diawali dari musyawarah perencanaan pembangunan kampung melalui forum rapat pada Badan permusyawaratan Kampung (Baperkam).

b. Di dalam penyusunan rencana pembangunan kampung, unsur tokoh masyarakat, tokoh agama dan tetua-tetua adat dilibatkan bersama-sama pemerintah kampung.

c. Di dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kampung, Pemerintah kampung menegakkan prinsip transparansi, terutama penggunaan anggaran pembangunan kampung;

d. Di dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah kampung menerapkan prinsip akuntabilitas publik melalui pertanggung jawaban hasil-hasil pelaksanaannya ditingkat kampung.

2. Partisipasi masyarakat sebagai variabel terikat (Y) diukur melalui beberapa indikator, yaitu :

a. Keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kampung;

b. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program/proyek pembangunan kampung;

c. Bantuan masyarakat berupa tenaga, material maupundana yang diberikan masyarakat a. a.dalam proses pelaksanaan pembangunan kampung.

d. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan kampung.

e. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan menjaga/ melestarikan hasil-hasil pembangunan kampung agar dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.

a. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan pengaruh penerapan otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat dalam Di dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kampung, Pemerintah kampung

menegakkan prinsip transparansi, terutama penggunaan anggaran pembangunan kampung;

Keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kampung;

pembangunan di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Dengan demikian, anggota populasi adalah semua aparat pemerintah desa yang ada di Distrik Saifi, sesuai data terakhir berjumlah 94 orang yang terdistribusi ke dalam 10 (sepuluh) desa atau kampung.

Mengingat besar populasi kurang dari 100 (seratus) orang, maka besar sampel ditetapkan secara purposive sebesar 50 % dari besar populasi, sehingga besar sampel responden ditarik secara purposive sebanyak 46 orang aparat pemerintahan Kampung yang terdistribusi ke dalam 5 kampung, yaitu kampung Kayabo yang berada di pesisir, kampung Sira terletak di lereng/punggung bukit dan 3 (tiga) kampung lainnya yang berada di dataran, yakni kampung Sisir, Kampung Komanggaret dan Mlaswat.

Adapun teknik penarikan anggota sampel dilakukan secara purposive random sampling berdasarkan nama kampung dan unsur pemerintahan kampung. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Besar Sampel Direncanakan Menurut Kampung dan Unsur Pemerintahan.

No.	Nama Kampung	Kepala Kampung	Sekkam	Ketua Baperkam	Aparat kampung	Ketua RW	Ketua RT	Jumlah
1	Kayabo	1	1	1	4	1	1	9
2	Sisir	1	1	1	4	1	1	9
3	Sira	1	1	1	4	1	1	9
4	Komanggaret	1	1	1	4	1	1	9
5	Mlaswat	1	1	1	4	1	2	10
Jumlah		5	5	5	20	5	6	46

Sumber : Distrik Saifi Dalam Angka, Tahun 2015

Mengacu pada penggunaan pendekatan kuantitatif, dan metode deskriptif, maka instrumen utamanya untuk mendapatkan data primer adalah Kuesioner atau daftar pertanyaan penelitian. Untuk menjangkau data sekunder digunakan teknik dokumentasi melalui pelacakan literatur dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Adapun semua data dan informasi dikumpulkan melalui metode survei dan observasi langsung.

Untuk mendeskripsikan data/variabel penelitian, maka penulis menggunakan teknik analisis persentase melalui penerapan tabel frekuensi, sementara, untuk menguji hipotesis penelitian, maka teknik-teknik analisis data yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan teknik analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis, dengan cara menyelesaikan persamaan prediksi : $\hat{Y} = a + bX$; (Sudjana, 1996).

di mana :

\hat{Y} : Nilai Y duga atau Y prediksi yang dicari

a : Konstanta a (jika $X = 0$), diselesaikan melalui rumus :

$$a =$$

$$\frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

b : nilai koefisien arah regresi, dengan rumus :

$$b =$$

variabel tak bebas (Partisipasi masyarakat), diperoleh dengan cara mengkwadratkan harga/nilai koefisien korelasi, yaitu (r^2).

3. Untuk uji signifikansi hubungan antara variabel, maka nilai r-hitung langsung dikonsultasikan dengan nilai r-tabel pada taraf uji 1 % dengan $dk = n-2$. Analisis data akan dibantu dengan program SPSS versi 20 for windows melalui perangkat computer.

PEMBAHASAN

Penerapan Otonomi desa sebagai variabel bebas atau variabel X, dikonsepsikan sebagai penerapan prinsip-prinsip otonomi desa atau otonomi murni berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai budaya atau kearifan lokal yang berlaku dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, mulai dari perencanaan sampai pada pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa, seperti : prinsip demokrasi dalam perencanaan (*bottom up planning*), prinsip transparansi, akuntabilitas dan

Tabel 1

Distribusi Skor Variabel Penerapan Otonomi Desa

Menurut Jawaban Responden

Kategorisasi Variabel Dan Kelas Interval		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah (19 - 21)	15	32,6	32,6	32,6
	Sedang (22 - 24)	21	45,7	45,7	78,3
	Tinggi (25 - 30)	10	21,7	21,7	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

demokratisasi (Widjaja, 2003).

$$\frac{(n\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

2. Untuk menaksir besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas, digunakan harga koefisien determinasi (r^2) dari hasil analisis korelasi sederhana (korelasi *product moment*) dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

- (1). Menghitung koefisien korelasi digunakan rumus *r-Pearson* yang dimodifikasi oleh Sudjana (1996), sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

- (2). Untuk mengetahui derajat determinasi (daya penentu) atau besarnya pengaruh dari variabel bebas (Penerapan Otonomi Desa) terhadap

Berdasarkan indikator-indikator variable Penerapan Otda, selanjutnya dirumuskan ke dalam daftar pertanyaan atau kuesioner sebanyak 6 butir pertanyaan, kemudian didistribusikan kepada 46 orang responden aparat pemerintah Kampung di dalam wilayah Kecamatan Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Hasil pengumpulan data melalui Kuesioner kemudian dilakukan tabulasi data dengan memberi skor setiap opsi jawaban berdasarkan skala likert, yaitu : opsi a diberi skor 5, opsi b diberi skor 4, opsi c diberi skor 3, opsi d diberi skor 2 dan opsi e diberi skor 1. Dengan demikian, skor teoritik tertinggi atau skor ideal untuk variabel

Penerapan Otonomi Desa (X) sebesar $(5 \times 6 = 30)$ dan skor terendah adalah $(1 \times 6 = 6)$.

Dengan mengacu pada hasil tabulasi data pada Tabel Raw Score (lampiran 1), selanjutnya dihitung beberapa komponen analisis, sebagai berikut :

- Rentang skor teoretik antara 6 – 30, dan rentang skor empirik antara 19 – 27;
 - Skor rata-rata ($M = 22,59$), Simpangan baku ($SD = 2,104$), Median ($Me = 23,00$), Modus ($Mo = 23$).
- Banyaknya kelas interval (bk_i) untuk variabel ini sebanyak 3 (tiga) kelas dengan 3 (tiga) kategori;
Panjang kelas interval (P) sebesar 3.

Langkah selanjutnya adalah menentukan kategorisasi variabel dan kelas interval guna menyusun tabel frekuensi, dengan memepuh langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

Menentukan Rentang (Rank) = Skor tertinggi di kurangi skor terendah

Menentukan banyak kelas (bk_i) = 3(tiga) kelas interval dan 3 (tiga) Kategori

Menentukan panjang kelas (P) = $P = \frac{8}{3} = 2,67$
dibulatkan keatas menjadi 3 (tiga)

Dengan menggunakan aturan kategorisasi dan kelas interval di atas, selanjutnya disusun Tabel Induk (*Master Table*) dengan memberi pengkodean (lihat lampiran 1), kemudian menggunakan program SPSS versi 20 for windows, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel1.

Sebaran data pada Tabel 1 berada pada kelas interval 22 – 24 dengan frekuensi sebanyak 21 orang responden atau sekitar 45,7 % dan terkategori “sedang” atau menengah, cenderung rendah (32,6%), serta sisanya sebesar 21,7 % berada pada kategori “tinggi”.

Sebaran skor variabel Penerapan Otonomi Desa sesuai dengan skor rata-rata variabel tersebut, yakni sebesar 22,59. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata capaian penerapan otonomi desasebesar 75,3% dari skor teoretik sebesar 30 skor. Artinya, bahwa masih menyisahkan sekitar 24,7% kriteria penerapan otonomi desa yang belum dicapai oleh pemerintah dan masyarakat desa/kampung, khususnya di wilayah Kecamatan Saifi

Kabupaten Sorong Selatan menurut pendapat responden.

Partisipasi Masyarakat sebagai variabel terikat, dikonsepkkan sebagai keterlibatan rakyat di dalam proses pengambilan keputusan, dalam implementasi program, dalam menerima manfaat pembangunan, dan dalam menilai atau mengevaluasi setiap program (Taliziduhu, 1987). Jadi, menurut konsep ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan atau keterlibatan individu sebagai anggota masyarakat dalam fase-fase pembangunan yang berlangsung dalam masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat adalah prakarsa, inisiatif dan keikutsertaan masyarakat, baik mental/pikiran, tenaga/fisik, maupun material (termasuk uang) dalam proses pembangunan kampung, khususnya di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan.

Mengacu pada indikator-indikator variabel Partisipasi Masyarakat Desa, selanjutnya dirumuskan ke dalam daftar pertanyaan atau kuesioner sebanyak 6 butir pertanyaan, kemudian dibagikan kepada 46 orang responden aparat pemerintah Kampung di dalam wilayah Kecamatan Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Hasil pengumpulan data melalui Kuesioner kemudian dilakukan tabulasi data dengan memberi skor setiap opsi jawaban berdasarkan skala likert, yaitu : opsi a diberi skor 5, opsi b diberi skor 4, opsi c diberi skor 3, opsi d diberi skor 2 dan opsi e diberi skor 1. Dengan demikian, skor teoritik tertinggi atau skor ideal untuk variabel Partisipasi Masyarakat (Y) sebesar $(5 \times 6 = 30)$ dan skor terendah adalah $(1 \times 6 = 6)$.

Dengan mengacu pada hasil tabulasi data pada Tabel *Raw Score* (lampiran 1), selanjutnya dihitung beberapa komponen analisis, sebagai berikut :

- Rentang skor teoretik antara 6 – 30, dan rentang skor empirik antara 17 – 29;
 - Skor rata-rata ($M = 23,61$),
 - Simpangan baku ($SD = 2,362$),
 - Median ($Me = 24,00$),
 - Modus ($Mo = 24$).
- Banyaknya kelas interval (bk_i) untuk variabel ini sebanyak 3 (tiga) kelas dengan 3 (tiga) kategori;
Panjang kelas interval (P) sebesar 4.

Langkah selanjutnya adalah menentukan kategorisasi variabel dan kelas interval guna menyusun tabel frekuensi untuk skor variabel Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

desa/kampung, dengan memempuh langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut : Menentukan Rentang (Rank)

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Skor VariabelPartisipasi Masyarakat Menurut Jawaban Responden

Kategorisasi Variabel Dan Kelas Interval		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah (17 - 20)	4	8,7	8,7	8,7
	Sedang (21 - 24)	27	58,7	58,7	67,4
	Tinggi (25 - 30)	15	32,6	32,6	100,0
	Total	46	100,0	100,0	

=
Skor tertinggi di kurangi skor terendah = 29 - 17 = 12

Menentukan banyak kelas (bk_i) = 3 (tiga) kelas interval dan 3 (tiga) Kategori

Menentukan panjang kelas

$$(P) = P = \frac{R}{bk_i} = \frac{12}{3} = 4$$

Dengan menggunakan aturan kategorisasi dan kelas interval di atas, selanjutnya disusun Tabel Induk (*Master Table*) dengan memberi pengkodeaan (lihat lampiran 1), kemudian menggunakan program *SPSS versi 20 for windows* untuk menghitung frekuensi dari masing-masing kategori dan kelas interval, yang hasilnya disajikan pada Tabel 1.

Distribusi data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata responden menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Distrik Saifi berada pada kategori “sedang”, yakni sebesar 58,7 % dari 46 responden yang diwawancarai, cenderung “tinggi” sebesar 32,6%.

Sebaran skor variabel Partisipasi Masyarakat sesuai dengan skor rata-rata variabel tersebut sebesar 23,61. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata capaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebesar 78,70% dari skor teoretik sebesar 30 skor. Artinya, bahwa masih menyisakan sekitar 21,30% kriteria partisipasi masyarakat yang belum dicapai oleh masyarakat desa/kampung, khususnya di wilayah Kecamatan Saifi Kabupaten Sorong Selatan menurut pendapat responden.

Hipotesis yang diajukan berbunyi “Penerapan Otonomi desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Distrik Saifi Kabupaten

Sorong Selatan”. Hasil analisis korelasi *product moment*, diperoleh koefisien korelasi antara penerapan otonomi desa (X) dengan partisipasi masyarakat (Y) sebesar $r = 0,544$ dan koefisien determinasi sebesar $r^2 = 0,296$. Jadi terdapat hubungan yang positif sebesar 54,4% antara penerapan otonomi desa (X) dengan partisipasi masyarakat (Y) disatu sisi, dan sumbangan atau kontribusi penerapan otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat sebesar 29,6%, sedangkan sisanya sebesar 70,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan uji signifikansi dengan cara mengkonsultasi nilai koefisien korelasi hasil penelitian (r_{hitung}) dengan nilai r_{tabel} , ternyata sangat signifikan pada taraf uji 1 %, di mana $r_{hitung} = 0,544$ jauh lebih besar dari $r_{tabel} = 0,384$. Jadi koefisien korelasi sebesar 0,544 adalah sangat signifikan dan dapat diberlakukan untuk populasi dengan taraf kesalahan 1%. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,544 antara penerapan otonomi desa dengan partisipasi masyarakat, khususnya di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Setelah diketahui bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara penerapan otonomi desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka dilanjutkan dengan analisis regresi linear sederhana untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh penerapan otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, apabila nilai variabel penerapan otonomi desa diubah (dinaik-turunkan). Dengan menerapkan program *SPSS for windows versi 20*, maka diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 9,821 + 0,610X$. Hal ini berarti bahwa naik-turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa karena

faktor penerapan otonomi desa dapat diprediksikan melalui persamaan regresi tersebut

F), di mana hasilnya dapat disimak pada Tabel 5. Tabel 3. Analisis Varians Untuk Uji Linieritas dan Keberartian Regresi

$$\hat{Y} = 9,821 + 0,610 X$$

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig. (*)
Regression	74,205	1	74,205	18,472	,000 ^b
Residual	176,751	44	4,017		
Total	250,957	45			

a. Dependent Variable: Partisipasi Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Penerapan Otonomi Desa

Keterangan :

*) = Sangat signifikan ($F_{hitung} > F_{tabel}$) pada $\alpha : 0,01$

df = Derajat Kebebasan

SS = Jumlah kwadrat

MS = Rata-rata jumlah kwadrat

Berdasarkan hasil uji linearitas (Gambar 3) dan Uji-F pada Tabel 4 di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut tentang hasil uji linearitas dan uji keberartian regresi sebagai berikut :

- 1). Untuk uji linearitas regresi menunjukkan bahwa data pengamatan berada disekitar garis regresi, mulai dari arah kiri bawah kemudian naik secara diagonal ke arah kanan atas.
- 2). Untuk uji keberartian regresi (uji dependen) didapat nilai $F_{hitung} = 18.472$. Jika diambil taraf uji 1% ($\alpha = 0,01$), dengan derajat bebas (dk) pembilang 1 dan dk penyebutnya 44, dari daftar distribusi F diperoleh $F_{0,01}(1,44) = 7,24$. jelas bahwanilai F_{hitung} jauh lebih besar dari F_{tabel} pada taraf signifikansi 1%.

Dengan demikian variabel partisipasi masyarakat independent (bebas) atas variabel penerapan otonomi desa ditolak. Ini berarti bahwa variabel partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa punya ketergantungan pada variabel penerapan otonomi desa. Dengan kata lain, bahwa salah satu faktor yang turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa,

khususnya di desa-desa atau kampung-kampung dalam wilayah Distri Saifi Kabupaten Sorong Selatan adalah penerapan otonomi desa atau otonomi murni.

Mengacu pada hasil pengujian statistik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan “Penerapan Otonomi desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan”, dapat diterima keberlakuannya secara empirik pada taraf signifikansi 1 %.

Hasil analisis korelasi dan regresi sederhana menunjukkan bahwa penerapan otonomi desa punya keterkaitan sekaligus berpengaruh sevara positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Besarnya kontribusi faktor penerapan otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat dapat dijelaskan melalui hasil analisis determinasi, di mana koefisien determinasi diperoleh sebesar $\pm 0,296$ mengindikasikan bahwa rata-rata variasi perubahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa turut ditentukan oleh faktor penerapan otonomi desa sebesar $\pm 29,6\%$, dan sisanya sebesar $\pm 70,4\%$ ditentukan oleh faktor lain.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa/kampung, khususnya di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan, sebagian ditentukan oleh faktor penerapan otonomi desa, baik pada tataran

perencanaan, pelaksanaan maupun pada tataran evaluasi, pelestarian dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Hal ini bermkna bahwa apabila penerapan otonomi desa tidak dilaksanakan secara optimal, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri akan mengalami hambatan, sehingga dapat dikatakan kurang mencapai hasil yang efektif.

Dengan terujinya hipotesis penelitian, maka dapat dilakukan prediksi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kedepan dengan memasukkan nilai skor tertinggi (skor teoretik) dari variabel penerapan otonomi desa, yakni sebesar 30 skor, maka diperoleh nilai $\hat{Y} = 9,821 + 0,610 (30) = 28,12$ atau 93,74%. Hasil ini dapat diinterpretasikan

bahwa apabila penerapan otonomi desa ditingkatkan

hingga mencapai nilai skor 30 atau 100% (memenuhi kriteria penerapan otonomi desa yang ditentukan berdasarkan indikator yang dikembangkan), maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diharapkan akan meningkat hingga mencapai $\pm 93,74\%$ dari kriteria/indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditetapkan. Angka ini naik sekitar 15,04 % dari rata-rata capaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang hanya sebesar 78,7%.

Beranjak dari hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa penerapan otonomi desa merupakan salah satu faktor determinan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kampung, khususnya di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kampung, salah satunya adalah melalui peningkatan efektivitas penerapan otonomi desa itu sendiri. Hal ini secara teoretis sejalan dengan sinyalemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya : Huntington dan Nelson (1994 :270), menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan desa, kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, dengan menerapkan otonomi desa secara efektif dan optimal, diharapkan masyarakat desa merasa dihargai karena dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan sehingga membangkitkan semangat dan rasa memiliki yang tinggi yang pada gilirannya mendorong mereka untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri.

Dalam kaitan ini, Tjokroamidjojo (1996:113), menyebutkan, pertama : partisipasi aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan; kedua, keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan desa dewasa ini masih ada beberapa masalah dan kelemahan, antara lain : a). Kemampuan masyarakat desa untuk melakukan perencanaan pembangunan masih rendah; b).Partisipasi masyarakat masih bertitik

tolak pada partisipasi dalam memikul beban pembangunan, dilain pihak partisipasi dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan dari penerimaan hasil-hasil pembangunan masih rendah; c). Prakarsa untuk melakukan tindak lanjut dari pada terbangunnya bangunan-bangunan desa berupa usaha pemeliharaan, penggunaan, pengusahaan bangunan masih langka dan sukar dibangkitkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil analisis data sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, berikut ini akan ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1). Penerapan otonomi desa berada pada kategori “sedang” cenderung “rendah”, sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berada pada kategori “sedang” cenderung “tinggi”. (2). Penerapan otonomi desa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penerapan otonomi desa berkontribusi positif dan nyata terhadap tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya di Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat teruji keberlakuannya secara empirik sekaligus dapat menjustifikasi teori-teori yang mendasarinya.

Saran

Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan Otonomi Desa, maka diharapkan agar pemerintah (Kabupaten/kota, provinsi) berkomitmen untuk melimpahkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai beberapa urusan yang langsung ditangani oleh pemerintah desa sehingga mendorong peningkatan intensitas penerapan otonomi desa.
2. Mengingat signifikannya pengaruh penerapan Otonomi desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka disarankan agar pemerintah daerah mendorong sekaligus mengefektifkan fungsi-fungsi kelembagaan desa sebagai mitra kerja pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Makassar: Graha Ilmu
- Effendi, T. N. 2007. *Pendekatan Pembangunan Perdesaan : Pengalaman Masa Lalu Dan Pilihan Masa Depan dalam* Hendayana, R., D. Arsyad, E. Jamal. 2007. Prosiding Lokakarya Nasional Akselerasi Diseminasi Inovasi Pertanian mendukung Pembangunan Berawal dari Desa. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). Bogor
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan, 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Muhammad, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta : Bina Aksara.
- , 1993, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudjana, 1996, *Teknik Analisis Regresi Dan Korelasi*, Tarsito, Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, "Perencanaan Pembangunan", Gunung Agung, Jakarta.
- Vredembrecht. J. 1981. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Cetakan ke-4. PT. Gramedia. Jakarta.
- Widjaja, Haw, 2003, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah tingkat II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.